










**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

	<b>NOMOR SOP</b>	: 188.45/1/Kum Tahun 2022
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 6 Juni 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	:
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 6 Juni 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: Kepala Bagian Hukum,  <b>MUHAMMAD ROJI, S.H.</b> NIP. 19830110 201001 1 020
<b>NAMA SOP</b>		: <b>INOVASI SI PAHAM (SISTEM PELAPORAN AKSI HAM)</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025		a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas; b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan; c. Memahami Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025; d. Memahami konsep dasar sistem operasi Komputer; e. Memahami pengoperasian inovasi SI PAHAM; f. Mampu berkomunikasi dengan baik; g. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
		a. Komputer dengan Link SI PAHAM; b. Printer; c. ATK; d. Jaringan Komunikasi Data.
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan inovasi "SI PAHAM (Sistem Pelaporan Aksi HAM)" dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidak transparanan, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaporan Aksi HAM Daerah.		

No	Kegiatan	Aktor Inovasi	Tim Pengelola/ Pelaksana Inovasi			Stakeholder Pelapor	Mutu Baku			Ket.
			Operator	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan inovasi						Mekanisme Pelaksanaan Inovasi			
2	Membuat surat Pengisian Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah						Komputer		Surat	
3	Verifikasi surat Pengisian Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah						Surat		Paraf	
4	Pembubuhan Tanda Tangan surat Pengisian Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah						Surat		Surat dengan Cap ditanda-tangani	
5	Penyampaian surat Pengisian Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah kepada stakeholder terkait						Surat dan Lampiran Format Pelaporan			
6	Stakeholder membuat laporan Aksi HAM berdasarkan format pelaporan dalam lampiran surat Pengisian Laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah						Komputer	5 Hari Kerja	Berkas Laporan	
7	Proses upload laporan pada aplikasi SI PAHAM						Komputer dan Link SI PAHAM	5 Menit	Berkas Laporan	
8	Proses verifikasi laporan yang masuk pada aplikasi SI PAHAM						Laporan Aksi HAM		Berkas Laporan	
9	Laporan diterima						Laporan Aksi HAM		Berkas Laporan	